



Perkenalan Indonesia Internet Governance Forum

ID-IGF

Maret 2019

Daftar isi

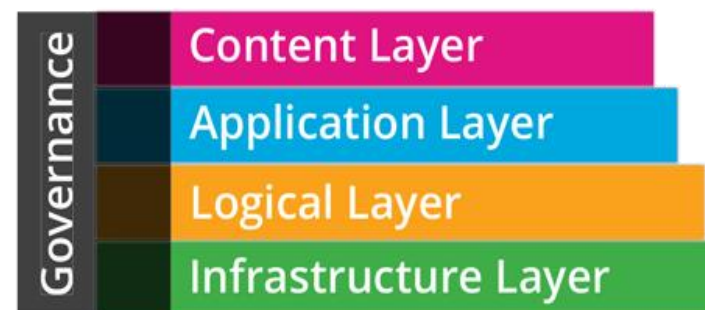
- I. Konteks**
- II. Internet Governance Forum sebagai forum global**
- III. Indonesia Internet Governance Forum – ID IGF**

I. Konteks

Setiap layer memiliki proses tata kelola yang berbeda.

Tata kelola Infrastruktur dilakukan oleh pemerintah melalui International Telecommunication Union, sementara layer Internet lain dikelola secara multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk).

Figure 1: The Different Layers of the Internet's Structure



Source: Authors.

I. Konteks

World Summit on the Information Society:

A clash between two models of global governance:

one based on agreements **among sovereign territorial states**;

the other based on **private contracting among transnational non state actors**, but relying in some respects on the global hegemony of a single state.

Milton L. Mueller, *Networks and States*, 2010

I. Konteks

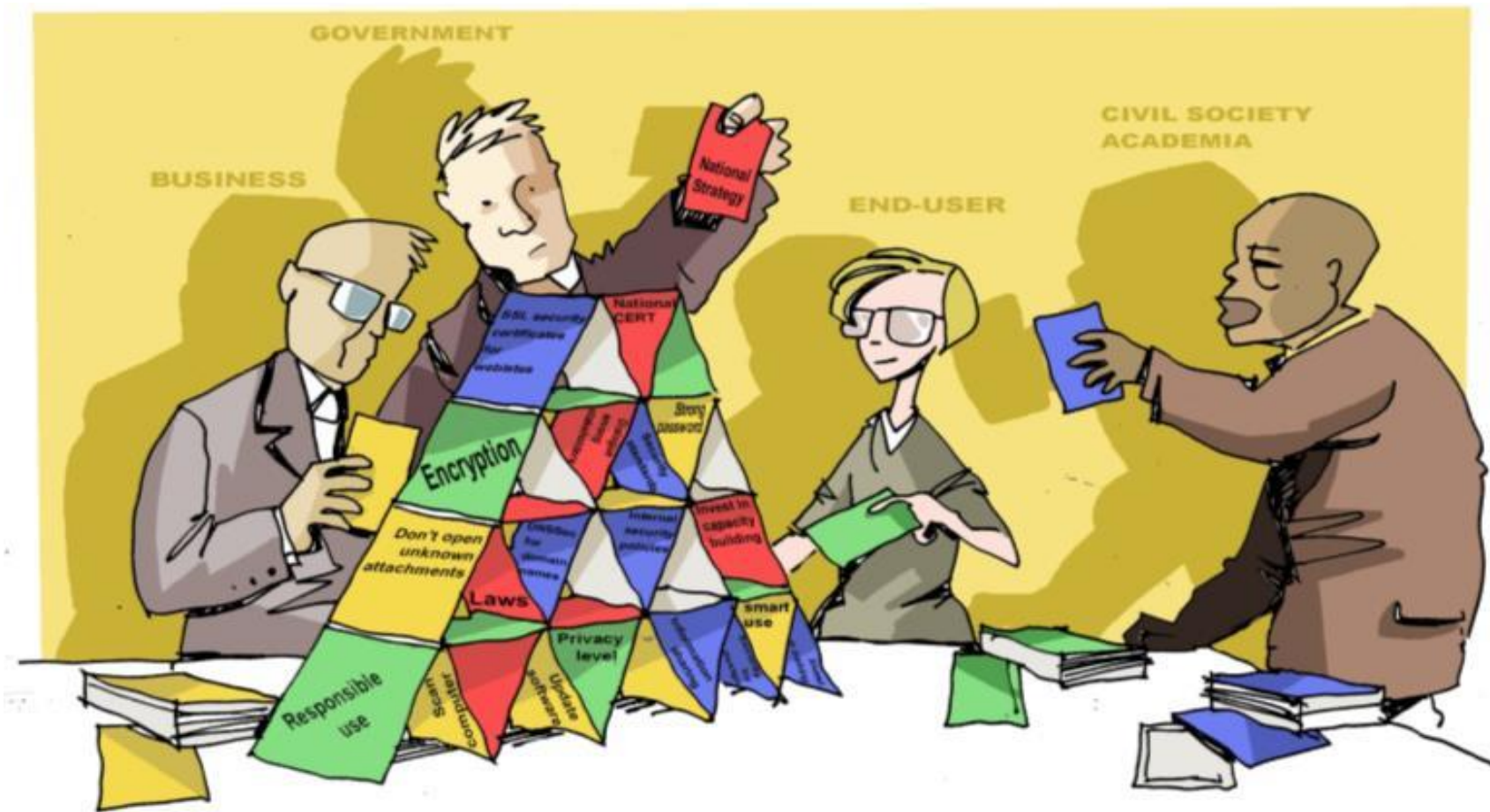


World Summit Geneva 2003
Tunis 2005
on the Information Society
Turning targets into action

II. Internet Governance Forum

- **Internet Governance Forum (IGF)** – jembatan dari dua pendekatan berbeda, difasilitasi Persatuan Bangsa Bangsa (2003 dan 2005)
- IGF tidak seperti tradisi PBB umumnya, dihadiri oleh multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) yang sejajar
- IGF bukan forum pengambil keputusan, tetapi memberikan inspirasi kepada mereka yang punya kapasitas
- 2015: Mandat IGF diteruskan – 10 tahun lagi!

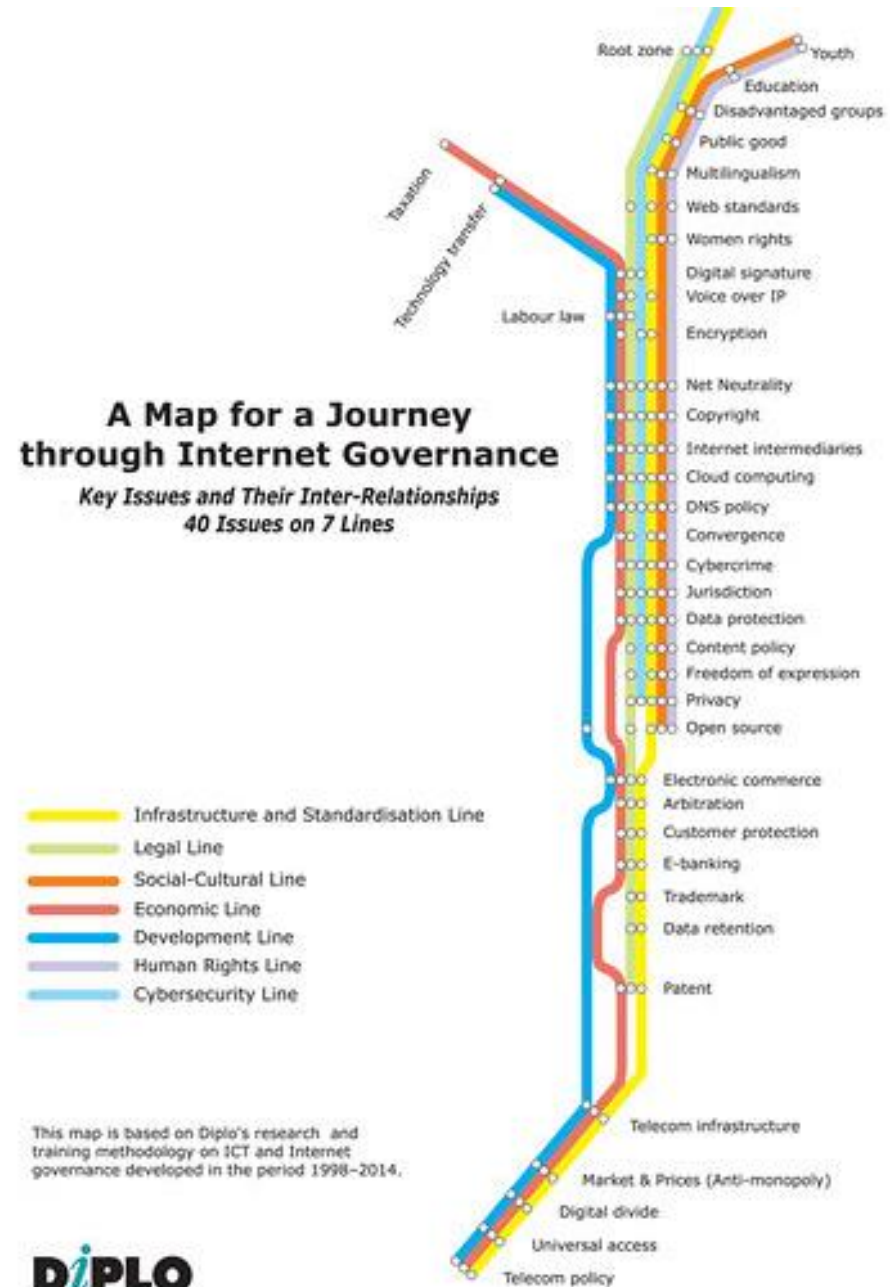
II. Internet Governance Forum



II. Internet Governance Forum – Topik

1. Infrastruktur dan Standarisasi
2. Hukum
3. Sosial Budaya
4. Ekonomi
5. Pembangunan
6. Hak Asasi Manusia
7. Keamanan Siber

A Map for a Journey through Internet Governance Key Issues and Their Inter-Relationships 40 Issues on 7 Lines



II. IGF Nasional

Ada **81** inisiatif IGF tingkat nasional

Africa – 22

Asia Pasifik – 10

Eropa Timur – 14

Amerika Latin dan Karibia – 19

Eropa Barat dan kelompok lain -- 16

National IGF Initiatives (81)				
AFRICA (22)	ASIA PACIFIC (10)	EASTERN EUROPE (14)	GRULAC (19)	WEOG (16)
Benin	Afghanistan	Albania	Argentina	Australia
Burkina Faso	Bangladesh	Armenia	Barbados	Austria
Cameroon	China*	Azerbaijan	Bolivia	Canada
Chad	Japan	Bosnia and Herzegovina	Brazil	Denmark
Democratic Republic of the Congo	Lebanon	Belarus	<u>Colombia</u>	Finland
Gambia	Nepal	Croatia	Costa Rica	France
Ghana	Pakistan	Estonia	Dominican Republic	Germany
Kenya	Republic of Korea	Georgia	Ecuador	Italy
Malawi	Sri Lanka	The former Yugoslav Republic of Macedonia	El Salvador	Malta
Mauritius	Indonesia	Moldova	Guatemala	Netherlands
Mozambique		Poland	Haiti	New Zealand
Namibia		Russia	Mexico	Portugal
Nigeria		Slovenia	Venezuela IGF	Spain
Rwanda		Ukraine	Panama	Switzerland
Senegal			Peru	United Kingdom
South Africa			Paraguay	United States of America
Sudan			Uruguay	
Tanzania			Saint Vincent and the Grenadines	
Togo			Trinidad and Tobago	
Tunisia				
Uganda				
Zimbabwe				



II. IGF Regional – 15



1. African IGF	9. European Dialogue on Internet Governance
2. Arab IGF	10. IGF Latin American and Caribbean Regional Regional Preparatory Meeting for IGF
3. Asia Pacific IGF	11. Macao IGF (pending)
4. Central Africa IGF	12. Persian IGF
5. Central Asia IGF	13. Southern Africa IGF
6. Caribbean IGF	14. Southern Eastern European Dialog on Internet Governance
7. Common Wealth IGF	15. West Asia
8. East Africa IGF	

III. Indonesia – Internet Governance Forum



APJII **DEKLARASI TATA KELOLA INTERNET INDONESIA** **IGF INTERNET GOVERNANCE INDONESIA FORUM**

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku - Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku - Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku - Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja;
3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku - Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah:

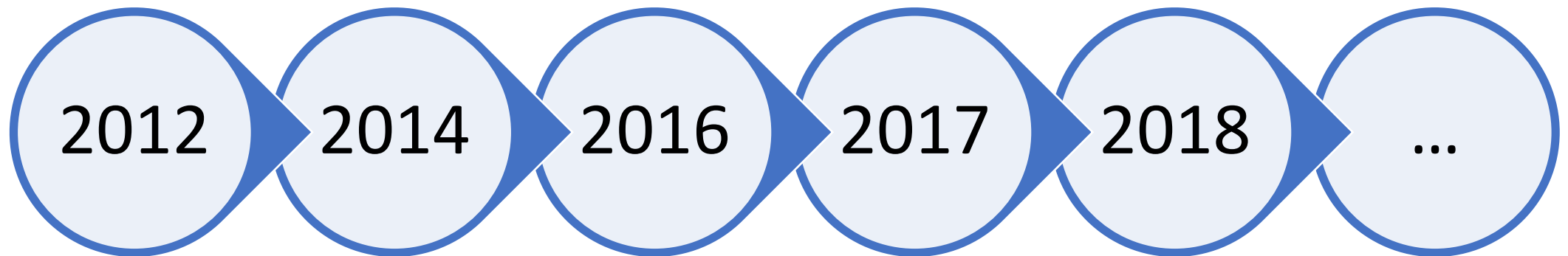
1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku - Kepentingan;
3. Tanggung jawab dari Negara;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal;
5. Sifat global dari Internet;
6. Integritas dari Internet;
7. Manajemen yang terdesentralisasi;
8. Arsitektur yang terbuka;
9. Netralitas jaringan;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta -1 November, 2012

Carlia ID/APTIKOM
YAMIN/NAMAL
SYLVIA W. SUMARLIN F.T. I. I.
SAMUDI AP (APJII)
R.K.I.
KANGOBY ARUSPLANGI
Wahyudi/Kadin
Andi P. PANDI
APIT
Wahyudi/Kadin
LUCKY MANGKEY
Donny J. ICT WATCH

III. Pelaksanaan Dialog Nasional ID-IGF



III. Dialog Nasional 2018

BUILDING BRIDGES AMONGST MULTI-STAKEHOLDER!

INFRA-1 =10-12; INFRA-2=13:00-14:30pm
Theme: toward Indonesian Internet that is Robust & Resilient

- HUKUM-1 = 10-12**
Theme: **Governance Private & Personal Data** in Indonesia (with case study on GDPR & Right to be Forgotten)
- SOSBUD-1= 10-12**
Theme: **Sharing Experience & Success Stories & Future Plans**
- SOSBUD-2 = 13:00-14:30pm**
Theme: **together Fighting Hoax**
- Youth ID-IGF: 10-12, 13:00-14:30pm**
Theme: **Hate Speech & Freedom expression**

III. Indonesia

Multistakeholder Advisory Group



- Didalam Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), ada posisi yang menjadi jembatan atau mewakili Komunitas internet seluruh Indonesia. Posisi tersebut adalah **Multistakeholder Advisory Group/ MAG**

MAG terdiri dari perwakilan:

- Pemerintah
- Akademisi
- Komunitas Teknis
- Organisasi Masyarakat Sipil
- Sektor Bisnis

Informasi lebih lanjut

www.igf.id

e-mail: info@igf.id / sekretariat@igf.id



The banner features a blue background on the left with various digital icons like a smartphone, Wi-Fi signal, laptop, and globe. On the right, a photograph shows three people jumping joyfully in a lush green forest, holding a flag. The text 'IGF INDONESIA' is prominently displayed in red and white in the center and top right.

2018 National Dialogue	2017 National Dialogue	2016 National Dialogue	2014 Na	
2013 Global IGF Bali	ID-IGF Declaration	Learning Material	Vacancies	Con



Referensi

- Hal. 1, Global Commission on Internet Governance – ONE Internet
- Hal. 7, 8 ,DiploFoundation
- Hal, 10, 11 Shita Laksmi, anggota MAG IGF Global (2014 – 2017), MAG ID IGF (2018 – 2020)
- H.12, Garin Ganis, anggota MAG ID IGF (2018 – 2020)
- H. 13 Yuan Oktavian, anggota MAG ID IGF (2018 – 2020)
- www.intgovforum.org